BAB IV
ANALISA HASIL PENELITIAN

4.1 Analisa Sistem dan Masalah yang dihadapi

Pada bab sebelumnya telah diuraikan tentang sistem pengawasan yang sedang berjalan saat ini tetapi sistem yang sedang berjalan tersebut belum dilaksanakan sepenuhnya oleh badan pengawas, sehingga menghambat proses pengadministrasian SPT Tahunan atau penatausahaan SPT Tahunan tersebut. Sistem pengawasan terhadap penyampainan SPT Tahunan PPh WP Badan di KPP Bandung Karees khususnya di seksi PPh Badan merupakan suatu rangkaian kegiatan usaha yang dilakukan dan dilaporkan oleh WP guna untuk mengetahui kebenaran dan keabsahan laporan WP dalam tahun pajak bersangkutan.

Bagi badan pengawas sendiri sebagai pemegangan kendali dalam pengawasan yang mempunyai wewenang dan tugas mengadakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap WP sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, guna untuk mengetahui secara langsung kegiatan yang dipimpinnya. Hal ini semua kegiatan yang dilakukan oleh bawahannya masih harus diikuti dan diawasi secara langsung, sehingga penyelewengan /penyimpangan yang terjadi kemungkinannya sangat kecil.

Dalam melakukan pengawasan seringkali petugas menemui kendala/masalah seperti:

1. Kesalahan WP dalam mengisi formulir SPT Tahunan

   Kesalahan dalam mengisi formulir SPT Tahunan seperti adanya kesalahan menulis NPWP, alamat, jumlah pajak yang seharusnya terhutang atau yang harus dibayar, sering kali ditemukan oleh badan pengawas. Hal tersebut dapat

juga memperlambat/menghambat proses pengawasan, karena WP masih harus melakukan pembetulan terhadap SPT tahunan yang salah tersebut.

Maka masih terbuka bagi WP untuk nelakukan pembetulan dengan menggunakan formulir 1771 yang bagian atas SPT Tahunan induk dan setiap lampirannya di cantumkan kata "PEMBETULAN", dan disampaikan ke KPP/KAPENPA tempat WP terdaftar atas kemauannya sendiri dalam jangka waktu tahun sesudah saat terhitungnya atau berakhirnya masa pajak / Bagian Tahun pajak dengan syarat Dirjen Pajak nelum melakukan tindakan pemeriksaan.

2. Terdapat kesulitan dalam mengisi formulir SPT Tahunan

Masih ada beberapa WP yang mengalami kesulitan dalam mengisi formulir SPT Tahunan hal ini disebabkan karena WP tersebut masih tergolong sebagai WP baru, jadi masih belum mengerti tentang cara-cara pengisian SPT Tahunan (yang seharusnya mengisi formulir SPT Tahunan tersebut dimulai dari lampiran-lampiran setelah lampirannya selesai diisi baru formulir induknya yang diisi). meskipun sudah ada buku petunjuk pengisian SPT Tahunan. Maka aparatur pajak harus lebih giat dalam melakukan penyuluhan- penyuluhan kepada WP tentang masalah yang berhubungan dengan pajak.

4.2 Analisa Peranan Pengawasan Terhadap Penyampaian SPT Tahunan

Pada bab sebelumnya telah dibahas uraian mengenai pernyataan tentang peranan pengawasan terhadap penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dalam bentuk kuesioner (angket), dimana hasil dari pengumpulan data tersebut akan

dibahas pada sub bab dibawah ini. Tetapi sebelumnya penulis tampilkan tabel tingkat kepatuhan WP kemudian tebel jawaban dari responden sebagai berikut :

Tabel 4.2.1

Tingkat Kepatuhan WP Badan

Tahun	WP Terdaftar	SPT Tahunan			Tingkat Kepatuhan
		Setor	Penundaan	Jumlah	
1996	5885	3100	21	3121	53.03%
1997	6341	2126	18	3144	49.58%
1998	6723	2937	79	3016	44.86%

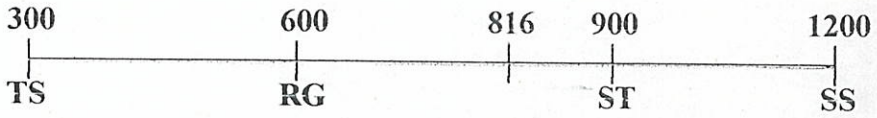
Tabel 4.2.2

Jawaban 30 Responden Mengenai Peranan Pengawas

No. Resp	Jawaban responden untuk item nomor										jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	4	3	2	3	3	4	3	3	2	2	29
2	3	4	2	1	4	3	2	1	2	2	24
3	3	3	1	3	3	4	3	2	1	4	27
4	2	2	4	2	3	2	1	4	3	2	25
5	4	3	3	4	3	4	4	3	2	2	32
6	4	1	3	4	3	2	3	2	1	3	26
7	3	2	2	1	2	4	3	4	4	2	27
8	4	3	4	3	2	3	4	1	2	3	29
9	4	1	2	3	4	3	2	1	3	4	27
10	3	4	3	4	3	2	4	3	2	1	29
11	4	3	4	2	3	3	2	2	3	3	29
12	3	4	2	4	3	4	3	1	2	1	27
13	4	2	2	4	3	4	2	2	1	2	26
14	4	3	2	4	4	3	2	3	2	1	28
15	3	4	3	4	3	4	3	3	2	3	32
16	4	4	3	3	4	3	1	2	1	2	27
17	4	2	4	4	3	2	3	3	1	2	28
18	4	3	2	3	2	3	4	3	2	1	27
19	3	4	2	4	3	3	2	3	2	2	28
20	2	3	3	1	4	3	2	4	1	2	25
21	3	2	3	4	3	3	3	4	3	2	30
22	4	3	2	4	2	4	3	2	1	1	26
23	2	4	2	2	3	4	3	2	2	2	26
24	4	4	3	2	3	2	2	3	2	1	26
25	3	2	2	2	4	3	4	2	1	2	25

26	4	3	4	1	3	4	4	3	2	2	30
27	3	4	3	3	2	3	4	3	2	2	29
28	4	4	2	3	2	2	3	4	2	1	27
29	2	2	3	1	2	3	2	3	1	2	20
30	4	3	2	1	3	4	2	1	3	2	25
Jumlah											816

Dari tabel diatas maka dapat di lihat jumlah skor hasil pengumpulan data yaitu sebanyak = 816 dengan demikian peranan pengawasan menurut persepsi 30 responden adalah 816 : 1200 = 68% dari kriteria yang telah ditetapkan. Hal ini secara kontinum dapapt di buat gambar sebagai berikut :



Tabel pernyataan telah di bahas pada bab sebelumnya dan pada bab ini ditampilkan tabel jawaban dari responden. Pada kuesioner (angket) maka dapat diketahui bahwa sikap responden yang diambil secara random (acak) peranan pengawas secara kontinum dapat dilihat bahwa jawaban responden terletak pada daerah antara ragu-ragu dan setuju, tetapi lebih condong pada daerah setuju. Jadi menurut data yang dikimpulkan bahwa peranan pengawasan itu sendiri sudah cukup baik. Tetapi jika kita lihat pada tabel tingkat kepatuhan WP maka kita tingkat kepatuhan WP tersebut dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan. Pada hal dapat kita lihat jumlah WP yang terdaftar mengalami peningkatan.

Peranan pengawasan erat hubungannya dengan tingkat kepatuhan WP, karena bila tidak ada pengawasan terhadap penyampaian SPT Tahunan maka akan memberikan peluang bagi WP untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan

negara dan dengan semaunya sendiri dalam penyampaian kewajiban perpajakannya. Jika kita analisa lebih lanjut mengapa tingkat kepatuhan WP menurun atau yang menyampaikan kewajibannya kurang, hal ini disebabkan karena adanya WP baik orang pribadi ataupun badan usaha baik didalam negeri maupun diluar negeri. Dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan penghasilan sehingga perusahaan tersebut dengan terpaksa harus gulung tikar karena biaya yang di keluarkan lebih besar daripada pendapatan yang diterima dan tidak dapat menyampaikan kewajiban pajaknya sehingga menjadikan WP tersebut tergolong WP Non aktif, meskipun WP tersebut Non aktif para aparatur perpajakan tetap melakukan pemeriksaan dan pemantauan.